



Laporan Bulan April



2018

Laporan Pelaksanaan Tugas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Meliputi Kepaniteraan Perdata, Pidana dan Hukum serta Kepegawaian dan Ortala, Umum dan Keuangan, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.04 Bantul Telp/faks. 0274-367348 Pos-el: surat@pn-bantul.go.id Situs: www. pn-bantul.go.id

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Pendahuluan	1
Pelaksanaan tugas	2
A. Kegiatan Administrasi Umum	
1. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	2
2. Bagian Umum dan Keuangan	4
3. Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelap	oran6
B. Kegiatan Administrasi Teknis	
1. Penyelesaian Perkara	8
2. Data Perkara	12
3. Pelayanan Hukum	15
4. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)	15
Progres dan Pencapaian	18
A. Perkara 3 bulan terakhir	18
B. Pelayanan Hukum	21
C. Sarana dan Prasarana	21
D. Tata Laksana Organisasi	21
E. Realisasi Anggaran	21
F. Kegiatan Perencanaan dan Anggaran	21
Kesimpulan dan Saran	22

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini adalah uraian kegiatan pada Pengadilan Negeri Bantul secara umum yang disampaikan secara ringkas. Selain diperlukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, laporan ini juga berfungsi sebagai kontrol terhadap kinerja internal Pengadilan Negeri Bantul. Sehingga diharapkan akan membantu mengontrol dan mendokumentasikan perkembangan statistik pada Pengadilan Negeri Bantul secara ringkas sehingga dapat diketahui fluktuasi hasil kerja pada setiap bulan dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja bulan selanjutnya.

Laporan ini menyajikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan di bidang sekretariatan terdiri dari bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana, bagian umum dan keuangan, serta bagian perencanaan IT dan pelaporan. Serta pelaksanaan kegiatan bidang kepaniteraan, diantaranya adalah bagian perdata, bagian pidana dan bagian pelayanan hukum.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan hingga pada bulan April ini bahwa Pengadilan Negeri Bantul telah melaksanakan kegiatan secara lancar dengan berbagai peningkatan baik pada penanganan perkara, administrasi perkara, pelayanan masyarakat, kegiatan pelaksanaan DIPA maupun kegiatan kebersamaan seperti kerja bakti untuk kebersihan dan kerapihan kantor. Atas pembinaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bantul, kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai harapan dan kendala-kendala yang dihadapi dapat dipecahkan bersama-sama.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk periode berikutnya.

Bab I **PENDAHULUAN**

Pengadilan Negeri Bantul merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Bantul dengan tingkatan kelas I B sejak tahun 2017. Kantor Pengadilan Negeri Bantul terletak di Jl. Prof Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul dan berada tidak jauh dengan kompleks kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Kepolisian Resor Bantul dan Kantor DPRD Kabupaten Bantul.

Laporan ini dibuat berdasarkan perkembangan yang terjadi pada masing masing bidang kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bantul dalam periode setiap satu bulan. Selain diperlukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, laporan bulanan ini juga berfungsi sebagai kontrol terhadap kinerja internal Pengadilan Negeri Bantul. Dengan adanya laporan ini diharapkan akan membantu mengontrol dan mendokumentasikan perkembangan statistik pada Pengadilan Negeri Bantul secara ringkas sehingga Pengadilan Negeri Bantul sendiri dapat mengetahui fluktuasi hasil kerja pada setiap bulan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja.

Untuk lebih jelasnya secara terperinci masing-masing bidang telah kami laporkan sendiri-sendiri sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor: KMA/080/SK/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lembaga Peradilan.

Laporan ini menyajikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan di bidang administrasi umum yang meliputi pelaporan di bagian sekretariatan yang terdiri dari bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana, bagian umum dan keuangan, serta bagian perencanaan TI dan pelaporan. Selanjutnya adalah laporan kegiatan bidang teknis yang menyajikan data-data pada bagian kepaniteraan, diantaranya adalah bagian perdata, bagian pidana dan bagian pelayanan hukum.

Bab II **PELAKSANAAN TUGAS**

Pada bab ini disampaikan rincian pelaksanaan tugas dan fungsi yang berjalan pada Pengadilan Negeri Bantul, diantaranya adalah pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kegiatan administrasi teknis. Pengadministrasian umum meliputi bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Umum dan Keuangan, serta Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. Sedangkan administrasi teknis terdiri atas kegiatan Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, dan Kepaniteraan Hukum.

A. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM

1 Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sub bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Beberapa hal yang dapat disampaikan dari bagian ini diantaranya sebagai berikut:

a. Statistik kepegawaian pada Pengadilan Negeri Bantul pada bulan April adalah:

1)	Jumlah pegawai pada akhir bulan April sebanyak 56 orang.				
2)	Apabila diperinci berdasarkan golongan		adalah	sebagai	
	berikut:				
	1) Golongan IV	:	3	Orang	
	2) Golongan III	:	49	Orang	
	3) Golongan II	:	3	Orang	
	4) Golongan I	:	1	Orang	
3)	Mutasi jabatan Struktural	:	-	Orang	
4)	Mutasi jabatan Fungsional	:	-	Orang	
5)	Mutasi dari dalam keluar	:	-	Orang	
6)	Mutasi dari luar ke dalam	:	1	Orang	
7)	Mutasi dari calon pegawai negeri ke	:	-	Orang	
	pegawai negeri				
8)	Mutasi karena pensiun	:	1	Orang	
9)	Mutasi dari pegawai honor ke CPNS	:	-	Orang	
10)	Kenaikan Gaji berkala	:	2	Orang	
11)	Pengusulan Kenaikan Pangkat	:	-	Orang	
12)	Permohonan kartu pegawai telah selesai	:	-	Orang	
13)	Permohonan kartu suami/istri telah selesai	:	-	Orang	
14)	Permohonan satya lencana karya	:	-	Orang	
15)	Jumlah pegawai yang terkena hukuman	:	-	Orang	
	disiplin				
16)	Meninggal dunia	:	-	Orang	
17)	Diklat / Tugas/ Dinas Luar				
	1) Golongan IV	:	-	Orang	
	2) Golongan III	:	-	Orang	
	3) Golongan II	:	-	Orang	
	4) Golongan I	:	-	Orang	

- 18) Prediksi
 - 1) Prediksi Kenaikan Pangkat Mei Orang 2) Kenaikan Gaji Berkala Bulan Mei 3 Orang 3) Pensiun Orang
- b. Pengorganisasian Pegawai pada Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1)	Hakim	:	11	Orang
2)	Panitera	:	1	Orang
3)	Sekretaris (merangkap KPA)	:	1	Orang
4)	Panitera Muda	:	3	Orang
5)	Panitera Pengganti	:	20	Orang
6)	Juru Sita	:	2	Orang
7)	Juru Sita Pengganti	:	3	Orang
8)	Kasubag	:	3	Orang
9)	Staf	:	12	Orang
10)	Pejabat Pembuat Komitmen	:	1	Orang
11)	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	:	1	Orang
	(PBJ)			
12)	Pejabat Penandatanganan SPM	:	1	Orang
13)	Bendahara Penerimaan	:	1	Orang
14)	Bendahara Pengeluaran	:	1	Orang
15)	Arsiparis	:	-	Orang
16)	Pustakawan	:	-	Orang
17)	Pranata komputer	:	-	Orang
18)	Pegawai fungsional yang diperbantukan	:	16	Orang

Tata laksana Kepegawaian

Tata laksana kepegawaian adalah bagaimana pegawai dalam sistem ini bekerja. Salah satunya adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur bagaimana setiap bidang dalam sistem ini berjalan.

No	Jenis SOP	Ada/tidak	Jumlah
		ada	
1.	SOP bidang Keperdataan	Ada	15
2.	SOP bidang Kepidanaan	Ada	15
3.	SOP Pelayanan Hukum	Ada	8
4.	SOP Layanan Informasi & pengaduan	Ada	2
5.	SOP tata persuratan	Ada	2
6.	SOP keperpustakaan	Ada	1
7.	SOP Tata laksana keuangan	Ada	9
8.	SOP Umum/tata laksana perkantoran	Ada	2
9.	SOP Pemeliharaan dan tata laksana Aset	Ada	5
10.	SOP tata laksana kepegawaian	Ada	9
11.	SOP tata laksana penganggaran	Ada	3
12.	SOP Teknologi Informasi	Ada	17
13.	SOP Pelaporan	Ada	3

Selain itu sebagai wujud kontrol atas sistem yang dijalankan di perlukan adanya Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk mengatur lebih lanjut tata kerja yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI. Berikut adalah SK (Surat Keputusan) yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Bantul selama bulan April 2018:

- 1) Surat Keputusan Nomor 9 tahun 2018 tentang Susunan Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Bantul.
- 2) Surat Keputusan Nomor 10 tahun 2018 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

2 Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan.

Berikut adalah pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan bagian umum dan keuangan pada bulan April 2018:

1. Pengelolaan Keuangan

DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

Anggaran DIPA dengan nomor DIPA-005.01.2.400172/2018 Pengadilan Negeri Bantul memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 6.213.405.000 (enam milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus lima ribu rupiah). Dari dana tersebut digunakan untuk program Pembinaan Administrasi dan pengelolan Keuangan Badan urusan Administrasi (Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan dan Layanan Perkantoran) dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Penyerapan anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi hingga bulan April ini adalah sebesar 28.48%. berikut adalah informasi terkait penyerapan anggaran DIPA 01 yang terjadi pada bulan April:

a) Realisasi Belanja Program

Program	DIPA (Rp.)	Realisasi bln ini (Rp.)	Realisasi s/d bln ini (Rp.)	Prosen- tase
Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	38.736.000	300.000	1.900.000	4,90%
Layanan Perkantoran	5.997.669.000	467.712.560	1.767.600.301	29,47%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	177.000.000	0	0	0%
Total	6.213.405.000	468.012.560	1.769.500.301	28,48%

b) Penerimaan Negara

1)	Porsekot Gaji	:	Rp.	0
2)	Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	:	Rp.	551.300
3)	Pengembalian Belanja	:	Rp.	0

❖ DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

Anggaran DIPA dengan nomor DIPA-005.01.2.400173/2018 Pengadilan Negeri Bantul memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 139.640.000 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Dari dana tersebut digunakan untuk program/kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang terdiri atas output Pos Bantuan Hukum; Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu; dan Program Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara.

Penyerapan anggaran DIPA Badan Peradilan Umum hingga bulan April ini adalah sebesar 15,64%. berikut adalah informasi terkait penyerapan anggaran DIPA 03 yang terjadi pada bulan April:

a) Realisasi Belanja Program

Program	DIPA (Rp.)	Realisasi bln ini (Rp.)	Realisasi s/d bln ini (Rp.)	Prosen- tase
Pos Bantuan Hukum	31.200.000	0	0	0%
Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu	108.440.000	8.146.000	21.843.050	20,14%
Program Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	-	-		
Total	139.640.000	8.146.000	21.843.050	15,64%

Penerimaan Negara

1)	Pendapatan Surat Pengesahan Dibawah Tangan	:	Rp.	0
2)	Pendapatan Uang Meja (Leges)	:	Rp.	111.000
3)	Pendapatan Ongkos Perkara	:	Rp.	670.000
4)	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	:	Rp.	2.013.400

2. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan persediaan Selama bulan April tidak terdapat transaksi BMN.

Nilai aset BMN pada neraca Badan Urusan Administrasi per 30 April adalah

Akun Neraca	Nilai (Rp)
Persediaan	13.966.780
Tanah	11.109.426.000
Peralatan dan Mesin	2.334.736.209
Gedung dan Bangunan	5.663.510.000
Jalan dan Jembatan	36.460.000
Aset Tetap Lainnya	48.152.062
KDP	0
Software	74.570.000
Aset tetap yang tidak digunakan dalam	58.921.000
operasional	
Akumulasi penyusutan	(2.151.075.964)
Jumlah	17.188.666.087

Nilai aset BMN pada neraca Badan Peradilan Umum per 30 April adalah

Akun Neraca	Nilai
Persediaan	1.871.890
Akumulasi penyusutan	(0)
Jumlah	1.871.890

3. Tata Persuratan

a.	Jumlah surat masuk	:	264	Surat
b.	Jumlah surat keluar	:	260	Surat
c.	Jumlah surat masuk sampai dengan bulan April	:	932	Surat
d.	Jumlah surat keluar sampai dengan bulan April	:	1.447	Surat

3 Bagian Perencanaan, IT, dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Kegiatan perencanaan, terutama perencanaan dalam hal anggaran tidak dilakukan secara rutin setiap bulan, melainkan telah satu kali pada setiap periode satu Tahun Anggaran. Dalam proses perencanaan dilakukan beberapa penelaahan berkaitan dengan sinkronisasi anggaran antara Dipa satuan kerja dengan Dipa pusat. Dan dalam pelaksanaan Dipa sangat dimungkinkan adanya atau diperlukan adanya revisi terhadap DIPA maka sub bagian ini bertugas meyiapkan dokumen untuk revisi tersebut.

Selanjutnya, untuk kegiatan TI bertugas melakukan maintenance kelancaran jaringan komputer baik jaringan lokal maupun penglolaan jaringan internet untuk keperluan kegiatan komunikasi data instansi. Memastikan bahwa komunikasi data dalam jaringan tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian melakukan pengelolaan website meliputi upload berita dan memegang control panel website. Kegiatan pelaporan meliputi pelaporan bulanan, laporan tahunan, SAKIP serta pelaporan lain yang berhubungan dengan penganggaran dan teknologi informasi.

a. Perencanaan DIPA

DIPA Badan Urusan Administrasi (01) : 6.213.405.000 DIPA Badan Peradilan Umum (03) : 139.640.000

Revisi DIPA 01 bulan ini:

• Tidak ada

Revisi DIPA 03 bulan ini:

- Tidak ada
- b. Teknologi Informasi

Internet Service Provider : Indihome
 Bandwidth : 100 Mbps
 Web hosting : 20 GB
 Server : 2 server

 Server aplikasi dalam kondisi baik

Server data dalam kondisi baik

SIPP : versi 3.2.0-3
 SIPP Web : versi 3.2.0-3

- Maintenance hardware bulan ini:
 - (tidak ada)
- Mantenance jaringan komputer bulan ini:
 - Penggantian Modem oleh pihak Telkom
- c. Pelaporan

• Laporan Bulanan terakhir : Bulan Maret

- Pelaporan lain:
 - o Tidak ada

B. KEGIATAN ADMINISTRASI TEKNIS

Kegiatan pada bidang teknis meliputi kegiatan penerimaan, pemeriksaan, dan putusan perkara Pidana dan Perkara Perdata, serta kegiatan pelayanan hukum bagi masyarakat baik berupa informasi hukum, legalisasi/pengesahan, surat keterangan tertentu, bantuan hukum, maupun pengaduan hukum.

1. Penyelesaian Perkara Bulan April 2018

a. Prosentase penyelesaian perkara pidana

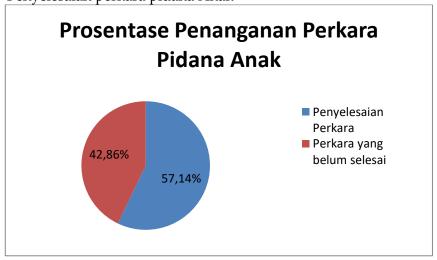
penyelesaian disajikan Prosentase perkara pidana dengan memperbandingkan sisa perkara bulan yang lalu ditambah jumlah perkara yang masuk pada bulan ini dengan jumlah perkara yang putus sehingga diperoleh angka yang mencerminkan kinerja penyelesaian perkara pidana dalam satu periode bulanan.

Berdasarkan formulasi tersebut diperoleh data sebagai berikut:

Penyelesaian perkara pidana biasa



Penyelesaian perkara pidana Anak



Penyelesaian perkara pidana singkat



Penyelesaian perkara pidana cepat



Penyelesaian perkara pidana lalu-lintas





Penyelesaian perkara pidana pra-peradilan

b. Prosentase penyelesaian perkara perdata

perkara Prosentase penyelesaian perdata disajikan dengan memperbandingkan sisa perkara bulan yang lalu ditambah jumlah perkara yang masuk pada bulan ini dengan jumlah perkara yang putus sehingga diperoleh angka yang mencerminkan kinerja penyelesaian perkara perdata dalam satu periode bulanan.

Berdasarkan formulasi tersebut diperoleh data sebagai berikut:



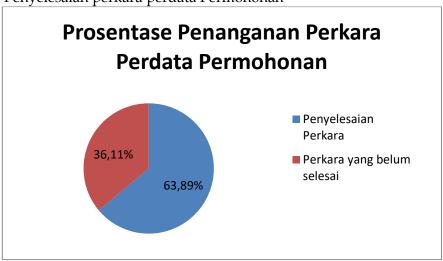
Penyelesaian perkara perdata Gugatan Sederhana



Penyelesaian perkara perdata Bantahan



Penyelesaian perkara perdata Permohonan



Penyelesaian perkara perdata Eksekusi



2. Data Perkara bulan April 2018

a. Data perkara pidana

1)	Perkara Pidana Biasa			
	a) Sisa perkara bulan lalu	:	27	Perkara
	b) Masuk bulan ini	:	32	Perkara
	c) Putus bulan ini	:	11	Perkara
	d) Sisa bulan ini	:	48	Perkara
	e) Sisa belum dibagi	:	0	Perkara
2)	Perkara Pidana Anak			
	a) Sisa perkara bulan lalu	:	5	Perkara
	b) Masuk bulan ini	:	2	Perkara
	c) Putus bulan ini	:	4	Perkara
	d) Sisa bulan ini	:	3	Perkara
	e) Sisa belum dibagi	:	0	Perkara
	f) Perkara yang diselesaikan secara	:		Perkara
	diversi			
3)	Perkara Pidana Singkat			
	a) Sisa perkara bulan lalu	:	0	Perkara
	b) Masuk bulan ini	:	0	Perkara
	c) Putus bulan ini	:	0	Perkara
	d) Sisa bulan ini	:	0	Perkara
	e) Sisa belum dibagi	:	0	Perkara
4)	Perkara Pidana Cepat			
	a) Sisa perkara bulan lalu	:	0	Perkara
	b) Masuk bulan ini	:	9	Perkara
	c) Putus bulan ini	:	9	Perkara
	d) Sisa bulan ini	:	0	Perkara
	e) Sisa belum dibagi	:	0	Perkara
5)	Perkara Pidana Lalu Lintas			
	a) Sisa perkara bulan lalu	:	0	Perkara

	b) Masuk bulan ini	:	610	Perkara
	c) Putus bulan ini	:	610	Perkara
	d) Sisa bulan ini	:	0	Perkara
6)	Putusan pidana yang disampaikan	:	24	Perkara
,	kepada para pihak tepat waktu (tidak			
	terlambat)			
7)	Upaya Hukum Banding			
,	a) Sisa perkara bulan lalu	:	4	Perkara
	b) Masuk bulan ini	:	3	Perkara
	c) Putus bulan ini	:	4	Perkara
	d) Sisa bulan ini	:	3	Perkara
8)	Upaya Hukum Kasasi			
	a) Sisa perkara bulan lalu	:	12	Perkara
	b) Masuk bulan ini	:	1	Perkara
	c) Putus bulan ini	:	1	Perkara
	d) Sisa bulan ini	:	12	Perkara
9)	Upaya Hukum Grasi			
	a) Sisa perkara bulan lalu	:	0	Perkara
	b) Masuk bulan ini	:	0	Perkara
	c) Putus bulan ini	:	0	Perkara
	d) Sisa bulan ini	:	0	Perkara
10)	Upaya Hukum Peninjauan Kembali			
	a) Sisa perkara bulan lalu	:	0	Perkara
	b) Masuk bulan ini	:	0	Perkara
	c) Putus bulan ini	:	0	Perkara
	d) Sisa bulan ini	:	0	Perkara
11)	Perkara Pra Peradilan			
	a) Sisa perkara bulan lalu	:	0	Perkara
	b) Masuk bulan ini	:	0	Perkara
	c) Putus bulan ini	:	0	Perkara
	d) Sisa bulan ini	:	0	Perkara
12)	Berkas Upaya hukum yang dikirim			
	secara lengkap dan tepat waktu			
	a) Banding	:	1	Perkara
	b) Kasasi	:	0	Perkara
	c) PK	:	0	Perkara
13)	Putusan Perkara yang Menarik	:	0	Perkara
	Perhatian masa			
	a) Perkara No			
	Putusan tanggal	:	-	
	 Putusan di upload tanggal 	:	-	

b.	Data	ı peı	rkara perdata			
	1)	Pe	rkara Perdata Gugatan			
		a)	Sisa perkara bulan lalu	:	33	Perkara
		b)	Masuk bulan ini	:	5	Perkara
		c)	Putus bulan ini	:	9	Perkara
		d)	Dicabut bulan ini	:	0	Perkara
		e)	Belum dibagi	:	0	Perkara
		f)	Sisa bulan ini	:	29	Perkara
	2)	Pe	rkara Perdata Gugatan Sederhana			
		a)	Sisa perkara bulan lalu	:	0	Perkara
		b)	Masuk bulan ini	:	4	Perkara
		c)	Putus bulan ini	:	4	Perkara
		d)	Dicabut bulan ini	:	0	Perkara
		e)	Belum dibagi	:	0	Perkara
		f)	Sisa bulan ini	:	0	Perkara
	3)	Pe	rkara Perdata Bantahan			
		a)	Sisa perkara bulan lalu	:	2	Perkara
		b)	Masuk bulan ini	:	1	Perkara
		c)	Putus bulan ini	:	0	Perkara
		d)	Dicabut bulan ini	:	0	Perkara
		e)	Belum dibagi	:	0	Perkara
		f)	Sisa bulan ini	:	3	Perkara
	4)	Pe	rkara Perdata Permohonan			
		a)	Sisa perkara bulan lalu	:	8	Perkara
		b)	Masuk bulan ini	:	28	Perkara
		c)	Putus bulan ini	:	23	Perkara
		d)	Dicabut bulan ini	:	0	Perkara
		e)	Sisa Belum Dibagi	:	0	Perkara
		f)	Sisa bulan ini	:	13	Perkara
	5)		itusan perdata yang disampaikan	:	36	Perkara
			pada para pihak tepat waktu (tidak			
			rlambat)			
	6)		rkara Perdata Banding		_	.
		a)	Sisa perkara bulan lalu	:	7	Perkara
		,	Masuk bulan ini	:	2	Perkara
		c)	Putus bulan ini	:	0	Perkara
		,	Dicabut bulan ini	:	0	Perkara
	_\	,	Sisa bulan ini	:	9	Perkara
	7)		rkara Perdata Kasasi			- 1
		a)	1	:	13	Perkara
		b)		:	0	Perkara
		,	Putus bulan ini	:	2	Perkara
		,	Dicabut bulan ini	:	0	Perkara
	C)	,	Sisa bulan ini	:	11	Perkara
	8)		rkara Perdata Peninjauan Kembali		_	D 1
		a)	1	:	2	Perkara
		b)	Masuk bulan ini	:	0	Perkara

		c) Putus bulan ini	;		0	Perkara
		d) Dicabut bulan ini	:		0	Perkara
		e) Sisa bulan ini	:		2	Perkara
		9) Berkas Upaya hukum yang dik	irim			
		secara lengkap dan tepat waktu				
		a) Banding	:		0	Perkara
		b) Kasasi	;		0	Perkara
		c) Peninjauan Kembali	;		0	Perkara
		10) Perkara Mediasi	;			
		a) Jumlah perkara yang di mediasi	. :		6	Perkara
		b) Perkara mediasi yang menjadi	akta :	:	2	Perkara
		perdamaian				
		11) Perkara eksekusi				
		a) Sisa Perkara Bulan lalu	:	. 4	l 6	Perkara
		b) Masuk Bulan ini	:		3	Perkara
		c) Perkara ditidaklanjuti (ekse	kusi :		1	Perkara
		dilaksanakan)				
		d) Dicabut	;			Perkara
		e) Sisa bulan ini	:	. 4	18	Perkara
3.	Pela	yanan Hukum Bulan April 2018				
	a.	Pelayanan akta badan hukum				
		1) Jumlah pengesahan/pendirian		:	42	2
		2) Jumlah Perubahan anggaran dasar		:	10)
		3) Jumlah Pembubaran/likuidasi		:	2	2
	b.	Pelayanan posbakum				
		1) Jumlah kunjungan posbakum		:	()
		2) Jumlah pelayanan posbakum		:	() (penunjukan majelis hakim untuk pendampingan dalam perkara)
		3) Jumlah petugas piket posbakum		:	5	-
	c.	Jumlah pengaduan masyarakat yang dite	erima	:	()

4. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Berikut adalah status perkara yang tercatat pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) per 30 april 2018 di Pengadilan Negeri Bantul.

STATUS DARI PERKARA GUGATAN

No	Status	Terlambat	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Penetapan Majelis	-	3	3
	Hakim/Hakim Gugatan			
2	Perkara Yang Belum Kesepakatan Mediasi	11	2	13
	Gugatan			
3	Perkara Yang Belum Putusan Gugatan	3	26	29
4	Perkara Yang Belum Minutasi Gugatan	1	4	5
5	Perkara Yang Belum Pemberitahuan	2	1	3
	Permohonan Banding Gugatan			

П	6	Perkara Yang Belum Pengiriman Berkas	1	2	3
		Banding Gugatan			
	7	Perkara Yang Belum Putusan Banding Gugatan	4	5	9
	8	Perkara Yang Belum Putusan Kasasi Gugatan	8	2	10
	9	Perkara Yang Belum Pemberitahuan Putus	1	-	1
		Kasasi Gugatan			

STATUS DARI PERKARA PERMOHONAN

No	Status	Terlambat	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Penetapan Majelis Hakim/Hakim Permohonan	-	3	3
2	Perkara Yang Belum Putusan Permohonan	-	13	13
3	Perkara Yang Belum Minutasi Permohonan	-	1	1

STATUS DARI PERKARA PERLAWANAN/BANTAHAN

No	Status	Terlambat	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Pengiriman Berkas	1	-	1
	Banding Perlawanan/Bantahan (deden verzet)			
2	Perkara Yang Belum Putusan Banding	-	1	1
	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)			

STATUS DARI PERKARA PIDANA BIASA

No	Status	Terlambat	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Putusan Pidana Biasa	-	48	48
2	Perkara Yang Belum Minutasi Pidana Biasa	-	6	6
3	Perkara Yang Belum Putusan Banding Pidana Biasa	-	1	1

STATUS DARI PERKARA PIDANA ANAK

No	Status	Terlambat	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Putusan Pidana Anak	-	3	3
2	Perkara Yang Belum Minutasi Pidana Anak	-	1	1

STATUS PENAHANAN

Jumlah Terdakwa Yang Masa Penahanannya Akan Habis Dalam Waktu Kurang Dari 7 Hari

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Pidana Biasa	1

Jumlah Terdakwa Yang Masa Penahanannya Telah Habis

No Jenis Perkara	Jumlah
Tidak Ada Data	

STATUS JURNAL KEUANGAN PERDATA

Jumlah Sisa Panjar Perkara Yang Belum Dikembalikan

No	Jenis Perkara	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Kasasi	Tingkat PK
1	Gugatan	73	25	14	-
2	Permohonan	13	-	-	-
3	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	2	1	-	-
4	Gugatan Sederhana	3	-	-	-

Jumlah Panjar Perkara Yang Hampir Habis (Kurang dari Rp. 100.000,-)

No	Jenis Perkara	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Kasasi	Tingkat PK		
Tidak Ada Data							

BAB III PROGRESS DAN PENCAPAIAN

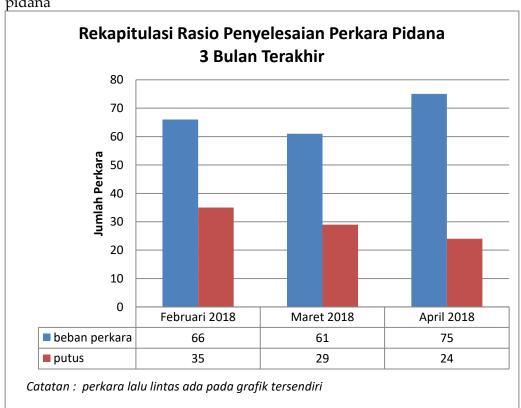
Bagian ini menyampaikan beberapa pencapaian atau kegiatan yang dilakukan selama bulan April tahun 2018 pada masing masing bidang. Penyampaian progress perkembangan disajikan dengan membandingkan data pada tiga bulan terakhir. Beberapa progres yang dicapai Pengadilan Negeri Bantul pada bulan ini adalah

A. Progres Penyelesaian perkara 3 bulan terakhir

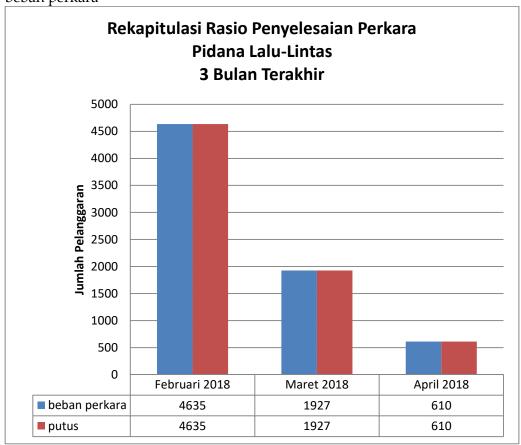
1. Penyelesaian perkara pidana

Bulan		Jenis Perkara						
		Pidana Biasa	Pidana Anak	Pidana Singkat	Pidana Cepat	Pidana Lalu- Lintas	Pidana Pra Peradilan	
Februari	Sisa awal	39	4	0	0	0	0	
2018	Masuk	15	0	0	8	4635	0	
	Putus	25	2	0	8	4635	0	
	Sisa akhir	29	2	0	0	0	0	
Maret	Sisa awal	29	2	0	0	0	0	
2018	Masuk	18	6	0	6	1927	0	
	Putus	20	3	0	6	1927	0	
	Sisa akhir	27	5	0	0	0	0	
April	Sisa awal	27	5	0	0	0	0	
2018	Masuk	32	2	0	9	610	0	
	Putus	11	4	0	9	610	0	
	Sisa akhir	48	3	0	0	0	0	

Grafik rekapitulasi rasio penyelesaian perkara pidana terhadap beban perkara pidana



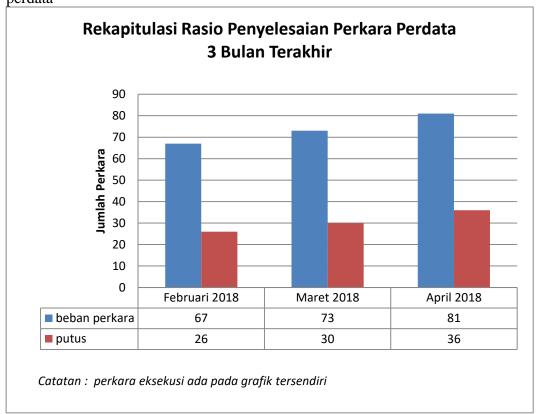
Grafik rekapitulasi rasio penyelesaian perkara pidana lalu-lintas terhadap beban perkara



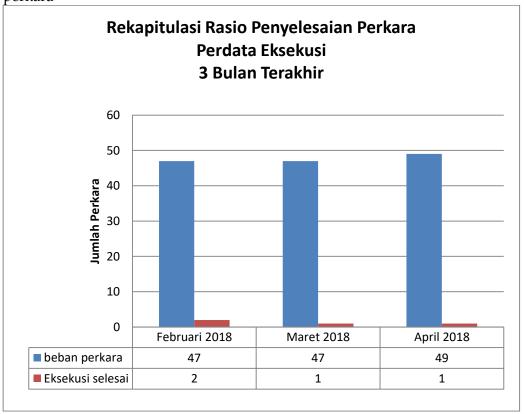
2. Penyelesaian perkara perdata

Bulan		Jenis Perkara						
		Perdata Gugatan	Perdata Gugatan Sederhana	Perdata Bantahan	Perdata Permo- honan	Perdata Eksekusi		
Februari	Sisa awal	30	0	2	10	41		
2018	Masuk	8	0	0	17	6		
	Putus	7	0	0	19	2		
	Sisa akhir	31	0	2	8	45		
Maret	Sisa awal	31	0	2	8	45		
2018	Masuk	13	0	1	18	2		
	Putus	11	0	1	18	1		
	Sisa akhir	33	0	2	8	46		
April	Sisa awal	33	0	2	8	46		
2018	Masuk	5	4	1	28	3		
	Putus	9	4	0	23	1		
	Sisa akhir	29	0	3	13	48		

Grafik rekapitulasi rasio penyelesaian perkara perdata terhadap beban perkara perdata



Grafik rekapitulasi rasio penyelesaian perkara perdata eksekusi terhadap beban perkara



B. Pelayanan hukum

- 1. Kepaniteraan Perdata
 - Pelayanan Kepaniteraan Perdata sudah berjalan sesuai dengan SOP.
- 2. Kepaniteraan Pidana
 - Pelayanan Kepaniteraan Perdata sudah berjalan sesuai dengan SOP.
- 3. Kepaniteraan Hukum
 - Arsip putusan sudah tertata dengan baik dan sudah masuk ke dalam SIPP.
- 4. Kejurusitaan
 - Pencatatan delegasi panggilan pada SIPP sudah berjalan dengan baik.

C. Sarana dan prasarana

- Perbaikan CCTV.
- Penggantian/Pembaruan Modem Koneksi Internet oleh pihak Telkom.

D. Tata Laksana Organisasi

Tata Laksana Organisasi sudah berjalan dengan baik.

E. Realisasi anggaran



F. Kegiatan perencanaan dan anggaran

kegiatan perencanaan dan anggaran, Pengadilan Negeri melaksanakan penyusunan anggaran DIPA Badilum Tahun Anggaran 2019 menyesuaikan dengan pagu indikatif yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bantul. Dalam DIPA pagu indikatif Tahun Anggaran 2019 Keseluruhan satuan kerja di wilayah Yogyakarta mengalami penurunan jumlah, demikian juga dengan DIPA PN Bantul. Dari jumlah Rp. 139.640.000 pada Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp. 127.440.000 pada Tahun Anggaran 2019.

Mengenai anggaran untuk Pembebasan Perkara (prodeo) dari seluruh satuan kerja di wilayah Yogyakarta hanya PN Yogyakarta yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.760.000 untuk 3 perkara. Dengan demikian Pengadilan Negeri bantul pada Tahun 2019 kemngkinan tidak mendapatkan anggaran untuk pembebasan biaya perkara. Namun demikian DIPA ini belum final sehingga masih ada kemungkinan untuk terjadinya perubahan pada DIPA definitif.

Bab IV KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan laporan kegiatan baik teknis maupun administrasi umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pada umumnya semua pelaksanaan kegiatan ada Pengadilan Negeri Bantul dapat berjalan namun masih perlu peningkatan performa pada masing masing bidang.
- Dengan volume pekerjaan yang cukup banyak, Pengadilan Negeri Bantul masih kekurangan personil tenaga untuk ditempatkan di bidang administrasi, baik administrasi di sekretariatan maupun di kepaniteraan.

2. Saran

Beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi adalah:

- Untuk kesekretariatan dengan beban pekerjaan yang semakin berat belum diiringi adanya penambahan kualitas ataupun kuantitas sumber daya manusia yang diperlukan untuk membagi adil pekerjaan yang ada
- Di kepaniteraan juga mengalami hal yang sama yaitu kekurangan staf pelaksana, akan tetapi dapat diatasi dengan memperbantukan tenaga teknis Penitera Pengganti untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana disamping tugas fungsionalnya.
- Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi tantangan tersendiri untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan untuk masyarakat. Dengan menggunakan sarana yang ada diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima dan masyarakat merasa terlayani dengan puas oleh kualitas pelayanan pengadilan.

Untuk mengatasi kendala tersebut beberapa saran yang dapat dilakukan adalah:

- Untuk mengoptimalkan kinerja Sumber Daya Manusia perlu dilakukan pembinaan baik secara internal maupun dorongan dari pengawas untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin serta dilakukan pelatihan untuk peningkatan kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat.
- Untuk sarana yang terbatas, dapat dilakukan dengan melakukan pemeliharaan/perawatan atas sarana tersebut untuk memperbaiki fungsi maupun estetika sehingga layak digunakan.

Bantul, 11 April 2018 Panitera,

Lestijono Warsito, S.H., M.H. NIP. 196605221991031002

Sekretaris.

Wiratno, S. H. NIP. 197202131993031002